



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

## BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

---

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 28 Maret 2024

Inspektur



DELLIYARTI S.M ,SE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196412311993032001

## KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dapat diselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023. Kinerja pemerintahan baik pada level daerah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pada skala nasional saat ini dihadapkan suatu kondisi yang harus dicapai, yaitu menerapkan paradigma baru pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, yang di dalamnya mencakup akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, tanggap, orientasi terhadap konsensus, partisipatif, efektifitas, efisien dan visi strategis yang kesemuanya ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dan disampaikan sebagai pelaksanaan kewajiban Biro untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Biro. Laporan Kinerja juga bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis atau target kinerja sebagaimana telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023. Adapun yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Biro Administrasi Pembangunan tahun 2023. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja merupakan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sepenuhnya kami menyadari, bahwa kualitas laporan ini belum sesuai dengan yang diharapkan hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan program dan kegiatan serta komitmen seluruh pegawai Biro dalam mengimplementasikan prinsip akuntabel

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Faktor eksternal yang bersifat sebagai fungsi kontrol untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Biro. Selain itu target indikator kinerja yang ditentukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu Biuro Administrasi Pembangunan selalu berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan.

Hasil dari penulisan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada seluruh bagian di lingkungan Biro tentang aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing serta sejauhmana capaian kinerja dapat diwujudkan pada tahun 2023 dan menjadi acuan dimasa mendatang untuk mewujudkan peningkatan kinerja.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Padang, Maret 2024

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

  
**BIA WIJAYANTY, ST, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770413 200003 2 002

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sebagai bagian komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja pemerintah menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sekaligus merupakan gambaran dari pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan dan sasaran organisasi.

Memenuhi maksud tersebut diatas Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 yang merupakan penerapan tahun kedua dari Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini disusun untuk mewujudkan kewajiban Biro guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi Biro dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan sasaran strategis yang menjadi target pelaksanaan kegiatan
2. Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dengan hasil capaian kinerja sebesar 106,46%
3. Pencapaian sasaran strategis 1 (satu) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja **yaitu *Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan*** dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 107,18% yang rinciannya terdiri dari Persentase Perangkat Daerah ( OPD Provinsi ) yang tertib administrasi pelaksanaan

pembangunan capaian kerjanya sebesar 105,68%. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan capaian kerjanya sebesar 108,69%.

4. Usaha yang dilakukan dalam rangka dalam rangka mewujudkan indikator kinerja terhadap ***Persentase Perangkat Daerah Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan*** adalah dengan menerapkan penggunaan aplikasi Simbangda bagi seluruh OPD Provinsi agar dapat terlaksananya tertib administrasi pembangunan yang mana seluruh OPD melakukan tahapan upload dokumen sebagai data dukung dan ketepatan waktu melaksanakan tertib pelaksanaan administrasi pembangunan.
5. Pencapaian sasaran strategis 2 (dua) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja yaitu ***Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja*** dengan capaian kinerja sebesar 107,94%
6. Pencapaian sasaran strategis 3 (tiga) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja yaitu ***Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi*** dengan capaian kinerja sebesar 103,53%

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	4
1.4 Struktur Organisasi .....	6
1.5 Sumber Daya Biro .....	10
1.6 Aspek Strategis Organisasi .....	17
1.7 Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi .....	18
1.8 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 .....	20
1.9 Sistematika Penyajian .....	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	26
2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.....	26
2.2 Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.....	28
2.2.1 Tujuan dan Sasaran .....	29
2.2.2 Strategis dan Kebijakan .....	30
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	30
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja .....	35
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja .....	37
3.3 Analisis Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 .....	39
3.3.1 Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal .....	40
3.3.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	72
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	79
BAB IV PENUTUP .....	85
4.1 Kesimpulan.....	85
4.2 Permasalahan dan Kendala.....	86

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Tingkat Pendidikan Pegawai Biro.....	11
Tabel 1.2	Kartu Inventaris Barang KIB B.....	13
Tabel 2.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026.....	29
Tabel 2.2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan.....	30
Tabel 2.3.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	31
Tabel 2.3.2	Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	32
Tabel 2.3.3	Perbandingan Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023 .....	32
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	37
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023.....	38
Tabel 3.3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	41
Tabel 3.3.1.2	Realisasi Kinerja IKU.....	41
Tabel 3.3.1.3	Statistika Evidence Januari sampai Desember Tahun 2023 .....	44
Tabel 3.3.1.4	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 pada Sasaran Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal.....	46
Tabel 3.3.1.5	Perjanjian Kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah .....	47
Tabel 3.3.1.6	Perangkat Darah Pelaksana Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 .....	52
Tabel 3.3.1.7	Data Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	52
Tabel 3.3.1.8	Anggaran Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah .....	53
Tabel 3.3.1.9	Perjanjian Kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.....	55
Tabel 3.3.1.10	Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten/Kota .....	56

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Setiap Kepala Perangkat Daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sementara berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/974/ED//GSB-2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran dan Analisa Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023, Laporan Kinerja Perangkat Daerah harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2023.

Laporan kinerja pemerintah khususnya laporan kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Biro Administrasi Pembangunan pada Tahun 2023. Ikhtisar perjanjian kinerja tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Biro

Administrasi Pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai sebuah instansi pemerintahan lainnya, dimana salah satu wujud dari azas penyelenggaraan *good governance* maka Biro Administrasi Pembangunan wajib membuat dan menyajikan laporan akuntabilitas kinerjanya setiap tahun. Laporan akuntabilitas ini disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan amanah Peraturan perundangan berlaku.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Sementara tujuan dari penyusunan LAKIP Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat adalah

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan kinerja ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi; dan
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek

### 1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan

#### 2. Tugas Pokok

Tugas pokok Biro Administrasi Pembangunan "*membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*".

#### 3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, biro mempunyai fungsi :

- a) Mendorong Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- b) Menjadikan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara

efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;

- c) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja serta Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
- d) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Pembaunangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut

- 1) penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- 2) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- 3) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 1.4 Struktur Organisasi

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala dan Bagian 1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Pejabat Fungsional dan Pelaksana dengan tugas sebagai berikut :

**1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RESTR), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup biro;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah memiliki fungsi sebagai berikut :

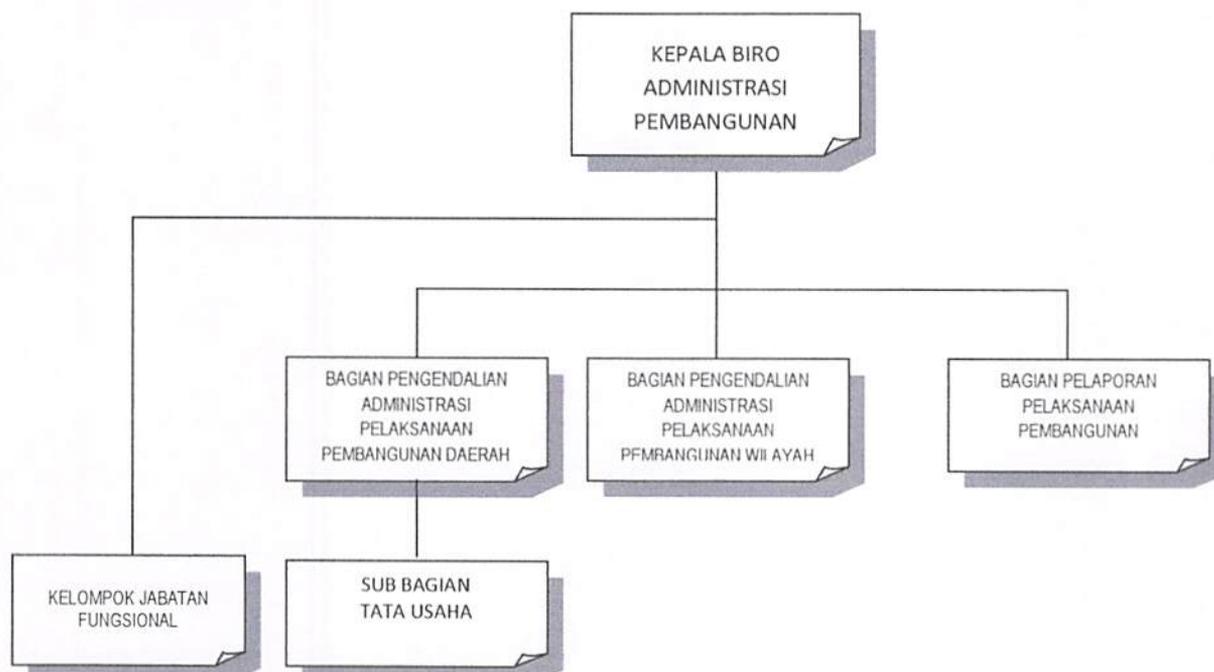
- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagan 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan**  
**STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**(Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023)**



### 1.5 Sumber Daya Biro

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

#### A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan kinerja yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2023, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Barat memiliki Aparatur Sipil Negara sebanyak 22 orang dan 5 Non Aparatur Sipil Negara dengan total seluruh pegawai 27 orang. Adapun rincian sebagai berikut 5 orang struktural, 5 orang fungsional penyetaraan, 12 orang fungsional umum. Selain itu Biro Administrasi Pembangunan dibantu 4 orang tenaga kontrak dan 1 orang tenaga IT kontrak. Dari 4 orang tenaga kontrak tersebut 2 orang tenaga kontrak dari Biro Umum yang diperbantukan pada Biro Administrasi Pembangunan. Pada tabel 1.1. dan grafik 1.1. berikut dapat dilihat kekuatan pegawai di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel 1.1.**

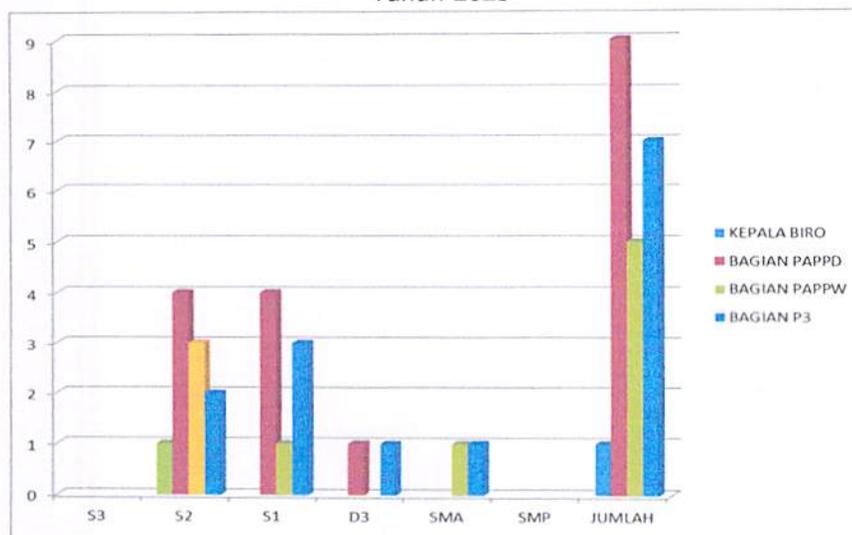
**Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2023**

No.	URAIAN	PENDIDIKAN						JML
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1.	Kepala Biro	0	1	0	0	0	0	1
2.	Bagian PAPPD	0	4	4	1	0	0	9
3.	Bagian PAPPW	0	3	1	0	1	0	4
4.	Bagian P3	0	2	3	1	1	0	7
	JUMLAH	0	10	8	2	2	0	22

*Sumber : Biro Adminitrasi Pembangunan Setda Prov. Sumatera Barat*

Berdasarkan tabel 1.1. di atas dapat dilihat, pada tahun 2023 pegawai di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat 45% berpendidikan S2 atau sebanyak 10 orang, 36% berpendidikan S1 atau sebanyak 8 orang, 9% berpendidikan D3 atau sebanyak 2 orang dan 9% berpendidikan SMU atau sebanyak 2 orang. Pegawai tersebut tersebar di 3 bagian yang ada dilingkungan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 1.1.  
Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan  
Tahun 2023



## B. Aset

Aset yang diserahkan pengelolaannya kepada Biro untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro dan Rantau per 31 Desember 2023 tercatat sebagaimana berikut.



PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
UNIT BIDANG

SUMATERA BARAT  
: BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

**KARTU INVENTARIS BARANG  
KIB B ( PERALATAN DAN MESIN )**

Tabel 1.2

KODE KONDISI : 11.01.13.20.A001B.0000.0000.0000

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	KELOMPOK	TANGGAL PEROLEHAN	SPEKIFIKASI		URAIAN	MURAH SAHURAN	JANJALAN BARANG	NOMOR KEMBARA	NOMOR MESIN	NOMOR PELAT	NOMOR BUKU	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PEROLEHAN	NILAI BUKU	SISA
					1	2											
1	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
2	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
3	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
4	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
5	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
6	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
7	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
8	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
9	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
10	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
11	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
12	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
13	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
14	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
15	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
16	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
17	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
18	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
19	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
20	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
21	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
22	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
23	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
24	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
25	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
26	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
27	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
28	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
29	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		
30	1.1.2.00.00.00.00.00	Meja	1	2013	1	1	Meja	1.000.000,00	1	1				1.000.000,00	1.000.000,00		

13 SEPTEMBER 2023  
RABU, 13 SEP 2023

LAMPIRAN/REKAMSIKAM 2023 DAN 2024 TAHUN 2022/2023/2024

Halaman 3 dari 8

NO.	NOMOR BAHAN	NAMA BAHAN	KELOMPOK	TAHUN	PERALANGAN	URUSAN	BIAYA (Rp)	JUMLAH BAHAN	NOLOK KANSA	NOLOK BELAN	NOLOK POKOK	NOLOK RUMAH	NOLOK PERSEKIAN	NOLOK PERSEKIAN	NOLOK PERSEKIAN	NOLOK PERSEKIAN
40	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2017	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2017	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2017	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
51	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
56	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	1.2.2.20.20.20.20.20	...	...	2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...





## 1.6 Aspek Strategis Organisasi

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari APBD
- b. Koordinasi dengan SKPD terkait dan Kementerian/Lembaga dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari APBN
- c. Koordinasi dengan SKPD terkait Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten/Kota
- d. Rapat evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran APBD/APBN/APBD Kabupaten/Kota
- e. Pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD/APBN/APBD Kabupaten/Kota
- f. Koordinasi dengan SKPD terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan kebijakan pembangunan
- g. Penerapan aplikasi monitoring dan evaluasi untuk efektifitas dan efisiensi pengendalian pembangunan Sumatera Barat.

Dalam melaksanakan peran aspek strategis tersebut juga di dukung dengan arah kebijakan yang tertuang didalam Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan realisasi fisik dan keuangan APBD sesuai dengan target
- b. Meningkatkan realisasi fisik dan keuangan APBN sesuai dengan target
- c. Meningkatkan pembinaan ke Kabupaten/Kota
- d. Meningkatkan realisasi fisik dan keuangan APBD yang anggaran APBD/APBN/APBD Kabupaten/Kota
- e. Meningkatkan pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD/APBN/APBD Kabupaten/Kota yang efisien

- f. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan peraturan terkait pengendalian pembangunan
- g. Meningkatkan pengendalian administrasi pembangunan secara efektif dan efisien

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung pencapaian Misi 7 (tujuh) **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”**. Untuk mendukung kinerja Biro Administrasi Pembangunan dalam pencapaian Misi 7 (tujuh) tersebut dilakukan melalui 1 Program yaitu **“ Program Kebijakan Administrasi Pembangunan “**

Pada saat ini Biro Administrasi Pembangunan terdapat 3 (tiga) Sasaran Startegis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Adapun yang menjadi permasalahan utama dan menjadi indikator sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 yaitu ***Persentasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan***. Biro Administrasi Pembangunan bertujuan *“ bagaimana seluruh Perangkat Daerah ( PD Provinsi Sumatera Barat ) dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan tertib administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang anggarannya dari dana APBD dan APBN “*.

### **1.7 Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Biro Administrasi Pembangunan masih dihadapi pada berbagai permasalahan antara lain :

- a. Perlunya memperbarui beberapa peraturan terkait pembangunan di Sumatera Barat seperti peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, peraturan tentang pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan lewat tahun anggaran, peraturan tentang proyek strategis/tahun jamak. Sehingga ada kepastian hukum dan pegangan bagi pelaksanaan

pekerjaan dilapangan.

- b. Monev yang dilaksanakan hanya menyentuh sebagian kecil dari paket pekerjaan yang ada. Sehingga untuk mengambil kesimpulan dengan sampel yang sedikit itu tentunya kurang valid. Sehingga kedepannya perlu peningkatan jumlah sampel monev yang dilaksanakan dengan tujuan mengurangi faktor kesalahan dalam mengambil kesimpulan masalah-masalah pembangunan.
- c. Kurangnya sarana mobilitas sangat berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan. Idealnya monev yang dilaksanakan selain yang terencana dengan melibatkan SKPD terkait sewaktu-waktu juga perlu dilaksanakan Sidak. Sehingga dapat dilihat kondisi asli dilapangan seperti apa. Hal ini tentunya harus didukung oleh sarana mobilitas yang ideal dalam pelaksanaannya.
- d. Perlu adanya sinkronisasi dari beberapa OPD dalam pengendalian pelaksanaan sebuah kegiatan baik dalam sisi pelaporan pelaksanaan kegiatan, terutama sinkronisasi data realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana perimbangan.
- e. Perlu adanya perencanaan yang matang dari OPD dalam melaksanakan kegiatan, terutama OPD yang memiliki sumber dana dari APBD dan APBN agar ada time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi padatnya pelaksanaan kegiatan diakhir tahun anggaran.
- f. Terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output.
- g. Pada umumnya SKPD belum mengentrykan permasalahan dan rencana tindak lanjut di dalam sistem
- h. Data yang dilaporkan pada Aplikasi Simbangda agar update dan valid
- i. Belum optimalnya penyelesaian proses lelang karena adanya review HPS untuk pekerjaan Kontruksi.

- j. Masih adanya keterlambatan DAK yang belum selesai akibat kelalaian dari SKPD sehingga mengakibatkan kerugian pada daerah
- k. Belum lengkapnya dokumen/bukti yang harus diupload kedalam system
- l. Masih adanya kegiatan yang belum terlaksana dan proses tender yang belum keluar izinnya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.
- m. Terkait Adanya Sub Kegiatan baru yang tidak dapat diinput karena OPD belum mengetahui tata cara entry kegiatan tambahan.
- n. Sehubungan adanya perbedaan realisasi fisik dan realisasi keuangan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan perhitungan total realisasi antar fisik dan keuangan, dan sudah dilakukan rumusan dengan pemberian bobot terhadap realisasi fisik maupun realisasi keuangan, sehingga terdapat keseimbangan terhadap realisasi fisik maupun keuangan.
- o. Terkait adanya OPD yang merubah paket kegiatan menjadi rutin, sehingga perlu dilakukan penguncian terhadap kegiatan tertentu termasuk kegiatan pada program penunjang pemerintah pada anggaran rutin.
- p. Terkait adanya penyatuan paket kegiatan yang seharusnya tidak disatukan.

### **1.8 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022**

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah dilakukan tindak lanjut melalui perbaikan kinerja selama tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
<b>1</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	
a	Agar lebih meningkatkan kinerja sehingga seluruh target indikator sasaran dapat tercapai melebihi yang telah ditetapkan	Meningkatkan 2 Indikator Kinerja dalam capaian targetnya
b	Melakukan pemantauan rencana aksi setiap bulan yang dituangkan dalam notulen rapat meliputi pembahasan target, hambatan dan kendala yang dihadapi, arahan pimpinan dan rencana penyesuaian aktivitas secara berjenjang sampai level individu	Kepala Biro Administrasi Pembangunan secara rutin melaksanakan rapat dengan seluruh Kepala Bagian dan Seluruh Staf di Awal Bulan dan Akhir Bulan guna mengevaluasi serta menargetkan kerja untuk tahun berikutnya setiap bulan nya
c	Melakukan penyesuaian aktivitas (program, kegiatan, sub kegiatan) untuk mendukung tercapainya target kinerja	Aktivitas Kegiatan serta Sub Kegiatan akan disesuaikan dengan target kinerja Bulanan yang dapat di ambil dari SIMBANGDA
d	Agar Meningkatkan komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Meningkatkan komitmen SDM Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
<b>2</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>	
a	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja	Data-data yang telah diminta dalam proses Upload dalam Aplikasi E SAKIP yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat baik Menpan R
b	Melakukan pemantauan kinerja secara berjenjang sampai level individu yang didokumentasikan dengan baik dalam notulen	Rapat Pimpinan Biro Administrasi Pembangunan serta Rapat dengan seluruh Staf telah dilaksanakan setiap Bulan dan Output nya telah di didokumentasikan melalui Notulen
c	Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian pemberian/pengurangan tambahan penghasilan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 telah melaksanakan pengukuran kinerja akan mempengaruhi penghasilan tambahan pegawai melalui aplikasi e madani dimana aplikasi ini mengambil 4 Penilaian yang terdiri dari Target Kinerja 50 %, Perilaku 30 %, Absen 10% dan Realisasi Anggaran OPD 10 %
d	Pengukuran kinerja agar dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja	Memastikan penetapan target indikator kinerja tahun 2024 mempedomani capaian kinerja TW 4 tahun 2023
e	Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran	Menggunakan Renja Biro Administrasi Pembangunan 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 dan tahun berjalan 2024

f	Melakukan perhitungan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran	Perhitungan Efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran telah disesuaikan Biro Administrasi Pembangunan dalam Aplikasi SIMBANGDA
<b>3</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	
a	Agar Laporan Kinerja menyajikan secara lengkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja sebagai berikut :	Memutakhirkan pelaporan kinerja sesuai dengan rekomendasi SAKIP
	- Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Memutakhirkan pelaporan kinerja sesuai dengan rekomendasi SAKIP
	- Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya	Memutakhirkan pelaporan kinerja sesuai dengan rekomendasi SAKIP
	- Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional ( Benchmark Kinerja)	Memutakhirkan pelaporan kinerja sesuai dengan rekomendasi SAKIP
	- Kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan	Memutakhirkan pelaporan kinerja sesuai dengan rekomendasi SAKIP
	- Informasi efisiensi yang telah dilakukan dan dapat dikuantifikasikan (informasi dan upaya efisiensi yang telah dilakukan )	Memutakhirkan pelaporan kinerja sesuai dengan rekomendasi SAKIP
b	Agar informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penggunaan anggaran dan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja)	Memutakhirkan pelaporan kinerja sesuai dengan rekomendasi SAKIP
c	Informasi dalam Laporan Kinerja agar dimanfaatkan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Memutakhirkan pelaporan kinerja sesuai dengan rekomendasi SAKIP
d	Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Memutakhirkan pelaporan kinerja sesuai dengan rekomendasi SAKIP
e	Menjadikan informasi dalam laporan kinerja untuk meningkatkan budaya kinerja organisasi	Memutakhirkan pelaporan kinerja sesuai dengan rekomendasi SAKIP

<b>4</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	
a	Malaksanakan pemantauan capaian kinerja internal sesuai SOP yang telah ditetapkan	Memutakhirkan pelaporan kinerja sesuai dengan rekomendasi SAKIP
b	Agar melakukan pemantauan capaian kinerja sampai pada tingkat staf	Memutakhirkan pelaporan kinerja sesuai dengan rekomendasi SAKIP
c	Melaksanakan pemantauan capaian kinerja internal dengan pendalaman yang memadai meliputi pembahasan target kinerja berjenjang, hambatan, kendala dan pembahasan rencana aktivitas, strategi dan kebijakan rutin dilakukan setiap bulan yang dituangkan dalam notulen atau laporan pemantauan	Melakukan pemantauan capaian kinerja internal sudah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIMBANGDA dsalam mewujudkan capaian kinerja biro
d	Menggunakan teknologi inforamasi ( aplikasi ) dallam melakukan pemantauan capaian kinerja internal	Biro Administrasi Pembangunan sudah menggunakan aplikasi SIMBANGDA dalam mrlsuksn pemantauan capaian kinerja internal

## 1.9 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berpedoman pada Lampiran V Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan sistematika sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan :

- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, struktur organisasi, sumber daya manusia.
- b. Aspek strategis organisasi
- c. Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- d. Tindaklanjut terhadap hasil evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan :

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
  2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
  6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- d. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja Esselon II

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Rencana Kerja (Renja ) Tahun 2023 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 sebagai titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2023 Biro Administrasi Pembangunan sesuai kebijakan Gubernur Sumatera Barat untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat, Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mempergunakan e-SAKIP. Untuk Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempergunakan e-SAKIP berdasarkan Renstra 2021-2026 serta DPA Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023.

### **2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan kerangka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Madani Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis.

Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

- 2) Sumatera Barat Yang Unggul Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.
- 3) Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. *Pertumbuhan ekonomi*, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi system produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, *Keberlanjutan*

*sosial*, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, *Keberlanjutan lingkungan*, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan tahun 2021-2026. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya asing.
2. Meningkatkan tata kehidupan social kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

## **2.2 Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat termuat secara lengkap dalam Rencana Strategis ( Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang,

tantangan, dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

### 2.2.1. TUJUAN DAN SASARAN

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjalankan Visi dan Misi Kepala Daerah berdasarkan kepada Misi 7 yaitu “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas” “ dengan tujuan

“ Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani “

Dengan Sasaran “ Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel “

Berdasarkan Visi dan Misi uraian diatas dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021 – 2026 dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2021 - 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
			1	2	3	4	5	6	
Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Terwujudnya Pengendalian Administrasi Pembangunan	1	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	90/90	91/91	92/92	93/93	94/94	95/95
		2	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN	90/90	91/91	92/92	93/93	94/94	95/95
		3	Rekomendasi yang ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3

## 2.2.2. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan Biro Administrasi Pembangunan menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, target kinerja hasil ( outcome). Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dapat diuraikan dalam table berikut:

**Tabel 2.2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Terwujudnya Pengendalian Administrasi Pembangunan	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah

## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator sebagai implementasi Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas,transparansi kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen terhadap amanah yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan penapaian tujuan dan sasaran

organisasi serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai unsur evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 telah di susun dan ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 4 April 2023. Pada Biro-biro penandatanganan Perjanjian kinerja dilakukan antara Kepala Biro dan Sekretaris Daerah selanjutnya untuk Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah bersama Gubernur Sumatera Barat. Perjanjian kinerja selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja Biro Administarsi Pembangunan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dan ditandatangani tersebut tergambar pada table berikut :

**Tabel 2.3.1**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	92 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B ( 65 )
3	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik (83)

Adapun dalam melaksanakan perjanjian kinerja tersebut Biro Administrasi Pembangunan pada tahu 2023 juga didukung oleh anggaran, anggaran dibawah ini merupakan anggaran perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
<b>I</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.114.189.596</b>
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.484.500
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.236.000
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.410.000
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.712.000
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	716.544.200
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.7272.896
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.075.000
<b>II</b>	<b>KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>922.424.743</b>
II.1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	494.933.873
II.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	427.490.870
<b>J U M L A H</b>		<b>2.036.614.339</b>

Table dibawah ini merupakan perbandingan anggaran sebelum perubahan dan setelah perubahan tahun 2023 :

**Tabel 2.3.3**  
**Perbandingan Anggaran Sebelum Perubahan dan Setelah Perubahan Tahun 2023**

No.	PROGRAM	ANGGARAN		SELISIH	KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,247,803,651	1,114,189,596	133,614,055	APBD
2	Kebijakan Administrasi Pembangunan	1,239,394,000	922,424,743	316,969,257	APBD
TOTAL		2,487,197,651	2,036,614,339	450,583,312	

Terjadinya pengurangan anggaran untuk tahun 2023 dikarenakan terjadinya kekurangan anggaran secara keseluruhan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga seluruh Perangkat Daerah mendapat refocusing anggaran.

## 2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan.

Dalam hal ini Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya terutama dalam melakukan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai kinerja menggunakan instrument pendukung dalam bentuk pelayanan ke Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan cara sebagai berikut :

1. Simbangda (Sistem Informasi Pembangunan Daerah )

Simbangda merupakan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh bukti realisasi fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah dengan mengunggah ke aplikasi bukti dukung (evidence) ke aplikasi.

2. Website BiroAdministrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai wadah informasi berupa website yang dapat diakses melalui :

[www.biroadmpembangunan.sumbarprov.go.id](http://www.biroadmpembangunan.sumbarprov.go.id).

Website memberikan informasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan Biro.

3. Layanan Informasi Media Sosial

Biro Administrasi Pembangunan juga memiliki media social sebagai wadah informasi yaitu facebook dan instagram.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Proses penyusunan pelaporan kinerja dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi instansi dengan tujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, dimana pelaporan kinerja ini akan menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai suatu pijakan dapat diwujudkan.

Tujuan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik adalah untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Pengukuran capaian target indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan terhadap Perubahan Tahun 2023. Hasil pengukuran capaian target kinerja disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro dalam memfasilitasi, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan

lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka indikator ini didasarkan atas dampak jangka pendek yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) tidak dapat digunakan, karena indikator ini akan lebih efektif digunakan sebagai pengukuran kinerja jangka panjang, dimana dalam pengukuran indikator kinerja ini perlu penelitian, analisa dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta aplikasinya di lapangan.

### 3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Dalam pengukuran akuntabilitas kinerja diperlukan data pendukung pelaksanaan kegiatan yang berasal dari sumber internal dan eksternal, dengan pengertian sebagai berikut :

- a. **Data Internal**, yaitu yang berasal dari sistem informasi yang ada pada Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Administrasi Pembangunan, dimana tingkat pengolahan data dilakukan pada level Bagian dan Sub Bagian serta staf yang berada pada Biro.
- b. **Data Eksternal**, yaitu data yang berasal dari stakeholder atau pihak-pihak di luar Biro Administrasi Pembangunan

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Adapun Biro Administrasi Pembangunan mendapatkan data melalui :

- 1) Rapat-rapat koordinasi antara Asisten dengan OPD Provinsi, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,
- 2) Rapat kerja/rapat koordinasi/bimbingan teknis/rapat dan pertemuan reguler Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Biro/ Bagian yang berwenang dalam urusan pembangunan.
- 3) Rapat kerja dalam rangka melakukan pelaporan realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi Simbangda berbasis Evidence.

Laporan Kinerja Biro Administarsi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Administarsi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/974/ED/GSB-2023 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran dan Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarnya diklasifikasikan berdasarkan tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	1
2	76% ≤ 90%	Tinggi	2
3	66% ≤ 75%	Sedang	3
4	51% ≤ 65%	Rendah	4
5	≤ 55%	Sangat Rendah	5

Pengukuran kinerja sebagaimana tabel tersebut di atas, mengacu kepada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan > **76 %**.

### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Berikut rekapitulasi realisasi indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 :

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Biro Administarsi Pembangunan Tahun 2023**

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan	Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	92 92	PD : 97,23 Kab/Kota :100	105,68 108,69	Sangat Tinggi	
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (65)	BB (70,16)	107,94	Sangat Tinggi	
3.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (83)	Baik (85)	103,53	Sangat Tinggi	
<b>Jumlah Capaian</b> .....						425,84		
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja</b> .....						106,46		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas diketahui bahwa 3 indikator kinerja sasaran strategis tercapai lebih dari 100%, Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 106,46% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan Sumatera Barat melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 telah dilakukan dengan baik.

Dari capaian atas 3 indikator kinerja diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan ,yang merupakan cerminan kinerja Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagai unsur Pendukung urusan Pemerintahan. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen dalam melaksanakan

- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dengan cara melakukan Tertib Pelaksanaan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Hasil evaluasi nilai akuntabilitas kinerja (LKjIP) Biro Administarsi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun pencapaian atas pengukuran kinerja Organisasi perlu lebih ditingkatkan lagi, dikarenakan nilainya baru 20,28% dari maksimal pembobotan 30%.
  3. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi didapat melalui hasil pada google form dimana akan diketahui tingkat kepuasan pelayanan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Google form diisi melalui aplikasi melalui telepon selular yang disebarakan kepada seluruh Perangkat Daerah.

### **3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023**

Mempedomani hasil pengukuran indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana disajikan di atas, pada sub bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (outcome) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh dan konstruktif. Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Biro Administrasi

Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:

### 3.3.1 Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, telah dirumuskan visi Kepala Daerah yaitu **Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan** yang didukung melalui 7 misi. Pada Misi ke 7 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas**, yang memiliki tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi, Kepala Daerah merumuskan 3 sasaran kinerja yang salah satunya yaitu terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel yang diukur dengan melakukan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hal inilah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya dalam Renstra Tahun 2021-2026, dengan 2 tujuan dan 3 sasaran.

Adapun Tujuan Pertama adalah Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan di dukung dengan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu : "***Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal.***" Dari sasaran 1 (satu) tersebut data dijabarkan bahwa indikator sasaran adalah Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang tertib Administras Pelaksanaan Pembangunan. Daeri Hasil pelaksanaan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dapat diketahui hasil capaian indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kode
1	Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	92	PD : 97,23 Kab/Kota :100	105,68 108,69	Sangat Baik	
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja</b>					<b>107,18</b>		

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Mewujudkan Pengendalian Administarsi Pembangunan Yang Optimal memperoleh capaian kinerja sebesar **107,18%** dengan artian **Sangat Baik**.

Dalam mewujudkan sasaran strategis pertama tersebut dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada SAKIP Provinsi Sumatera Barat pada komponen nilai Perencanaan Kinerja terealisasi sebesar 26,42 yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3.1.2**  
**Realisasi Kinerja IKU**  
**Sasaran Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal**

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	18,79	26,42
2	Pengukuran Kinerja	30	15,07	20,28
3	Pelaporan Kinerja	15	10,15	10,85
4	Evaluasi Internal	25	6,19	12,62
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	9,88	0
<b>Nilai Hasil Evaluasi SAKIP</b>		<b>100</b>	<b>60,08</b>	<b>70,16</b>

Sumber data : hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa target kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan nilai SAKIP dari tahun 2022 60,06 ( B ) di tahun 2023 70,16 ( BB ). Dalam pelaksanaan penghitungan capaian realisasi kinerja terhadap indikator kinerja “ **Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan** “ adalah sebagai berikut :

$$\text{REALISASI TERTIB ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH} = \frac{\text{JUMLAH EVIDENCE DISETUJUI}}{\text{JUMLAH EVIDENCE YANG DI UPLOAD}} \times 100\%$$

$$\frac{37.879}{38.957} \times 100\% = 97,23 \%$$

$$\text{REALISASI TERTIB ADMINISTASI KAB/KOTA} = \frac{\text{JUMAH KAB/KOTA PENYAMPATAN LAPORAN FISIK DAN KEU}}{\text{JUMLAH SELURUH KAB/KOTA}} \times 100\%$$

$$\frac{19 \text{ kab/kota}}{19 \text{ kab/kota}} \times 100\% = 100 \%$$

Indikator kinerja Perentase Perangkat Daerah Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah ( PD Provinsi Sumatera Barat ) sebagai berikut :

- i. Upload Data Perencanaan yang terdiri dari : KAK, RUP, HPS, Rapat-rapat persiapan awal kegiatan.
- ii. Upload Data Pelaksanaan yang terdiri dari : Kontrak, SK Tim, Dokumen lelang, dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, rapat-rapat pelaksanaan kegiatan
- iii. Upload Data Pelaporan yang terdiri dari : laporan serah terima kegiatan, Laporan Akhir masing-masing sub kegiatan
- iv. Ketepatan waktu masing-masing OPD melaksanakan upload evidence pada aplikasi Simbangda ( paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya ).

Berdasarkan Indikator Kinerja tersebut diatas bahwa capaian kinerja terhadap indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah ( PD Provinsi) yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sebesar 105,68%. Sedangkan capaian kinerja terhadap Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sebesar 108,69%.

Dari data yang di upload dan dijadikan sebagai evidence dari masing-masing sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD Provinsi. Data evidence yang telah dilaksanakan sampai kondisi 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel  
3.3.1.3**

**Statistika evidence  
Januari sampai Desember  
Tahun 2023**

No	SKPD	Helpdesk	Total paket	Total evidence di upload	Total evidence belum di periksa		Total evidence di setuju	Total evidence di tolak
					Sesababnya	Penyedia		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Zukzli	75	438	0	0	438	0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	E Fendrizal	72	498	0	0	498	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rahmi Dewi, ST, MM	82	352	0	0	350	2
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	ARRENDY IKHSAN, S.STP	62	224	0	0	224	0
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Lina Oktavia, SE, M.Si	39	219	0	0	219	0
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Yoyal Eka Putra, SH	83	314	0	0	304	0
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (HKD)	Yoyal Eka Putra, SH	3	22	0	0	22	0
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ARRENDY IKHSAN, S.STP	51	236	0	0	236	0
9	BADAN PENGHUBUNG	ARRENDY IKHSAN, S.STP	51	143	0	0	143	0
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Niswan, A.Md	91	619	0	0	619	0
11	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	NOVITA RIDHA, S.STP	37	232	0	0	229	0
12	BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAH	DELVI SUKRI	43	78	0	0	78	0
13	BIRO HUKUM	M. IKHSAN NOVIANDY, S.STP, M.Si	33	138	0	0	138	0
14	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	E Fendrizal	41	172	0	0	172	0
15	BIRO ORGANISASI	Niswan, A.Md	27	96	0	0	96	0
16	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rahmi Dewi, ST, MM	48	336	0	0	336	0
17	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	Akmal Rusli, SE	31	99	0	0	99	0
18	BIRO PEREKONOMIAN	Laura Nurainda	52	274	0	0	267	0
19	BIRO UMUM	ARRENDY IKHSAN, S.STP	62	345	0	0	308	0
20	DINAS BINA MARGA, Cipta Karya dan Tata Ruang	FEBI FORTUNA, S.STP	264	2281	0	0	2281	0
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	FEBI FORTUNA, S.STP	40	162	0	0	162	0
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Niswan, A.Md	62	228	0	0	214	0
23	DINAS KEBUDAYAAN	E Fendrizal	119	725	0	0	723	2
24	DINAS KEHUTANAN	Ibnu Razi Putra Darul, S.STP	441	2940	13	0	2926	1
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Yoyal Eka Putra	229	1597	1	0	1594	2
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Yoyal Eka Putra, SH	54	204	0	0	204	0
27	DINAS KESEHATAN	Rahmi Dewi, ST, MM	231	1627	0	0	1591	36
28	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	DELVI SUKRI	95	686	0	0	662	0
29	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	NOVITA RIDHA, S.STP	119	1047	0	0	1047	0
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Yoyal Eka Putra	107	796	0	0	796	0
31	DINAS PANGAN	Akmal Rusli, SE	83	403	0	0	399	4
32	DINAS PARIWISATA	Ekho Wisa	82	472	0	0	471	0
33	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rahmi Dewi, ST, MM	88	398	0	0	397	1
34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DELVI SUKRI	74	577	0	0	577	0
35	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	M. IKHSAN NOVIANDY, S.STP, M.Si	101	535	0	0	535	0

36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Lilwa Oktavia, SE, M.Si	53	351	0	0	331	0
37	DINAS PENDIDIKAN	MUHAMMAD FAJRI ZALMI, S.STP, M.Si	1424	3456	0	0	2765	3
38	DINAS PERHUBUNGAN	Akmal Rusli, SE	59	289	0	0	280	0
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Zulfikri Malinda	150	788	0	0	788	0
40	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	SYUKRI PITER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kem	518	2339	0	0	2339	0
41	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	SYUKRI PITER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kem	822	4973	0	0	4973	0
42	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	SYUKRI PITER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kem	152	1025	0	0	915	0
43	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	M. IKHSAN NOVANDI, S.STP, M.Si	31	89	0	0	89	0
44	DINAS SOSIAL	DELVI SUKRI	440	1936	0	0	1937	5
45	DINAS SUMBAR DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	FEBI FORTUNA, S.STP	340	2407	0	0	2407	0
46	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Ibnu Razi Putra Dairil, S.STP	58	348	0	0	331	0
47	INSPEKTORAT	Yovai Eka Putra, SH	56	185	0	0	185	0
48	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN	SYAHRAL MUIS	46	306	0	0	274	0
49	RUMAH SAKIT LIMUM DAERAH DIR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	SYAHRAL MUIS	19	136	0	0	133	0
50	RUMAH SAKIT LIMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIK	SYAHRAL MUIS	21	237	0	0	229	0
51	RUMAH SAKIT LIMUM DAERAH PARIAMAN	SYAHRAL MUIS	20	164	0	0	164	0
52	SEKRETARIAT DPRD	Lilwa Oktavia, SE, M.Si	83	365	0	0	354	0
Total			7464	38957	14	0	37879	56

Hasil akhir dari penginputan evidence pada aplikasi Simbaga akan menjadi hasil dari bukti pelaksanaan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan di lingkup Perangkat Daerah Provinsi. Dari melakukan input evidence kegiatan akan menghasilkan capaian realisasi fisik dan keuangan setiap pelaksanaan sub kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah seperti tabel berikut ini :

TABEL 3.3.1.4

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2003  
PADA SASARAN MEWUJUDKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN YANG OPTIMAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN Rp.	REALISASI ANGGARAN Rp.	CAPAIAN (%)	
Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal	Persentase perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan	Kebijakan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan		Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan			922,424,743	876,465,968	95.02	
				Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD						
				Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN						
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat	92%	Fisik :99.07 Keu : 94.28	494,933,873	475,556,238	96.08	
			Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Prov. Sumbar	92%	Fisik :99.07 Keu : 94.28	123,952,408	118,127,248	95.3	
			Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN	92%	Fisik :93.81 Keu : 93.01	149,086,250	136,419,375	91.5	
			Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	Persentase realisasi fisik dan keuangan yang bersumber dari APBD Kab/Kota, dana APBN yang diterima Kab/Kota	92%	Fisik : 94.56 Keu : 89.07	221,895,215	221,009,615	99.6	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi fisik dan keuangan SKPD Prov. Dan Presentase kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan target	92%	Fisik :99.07 Keu : 94.28	427,490,870	400,909,730	93.78	
			Analisis capaian kinerja pembangunan daerah	Jumlah hasil analisa triwulan terhadap capaian kinerja pembangunan daerah	4 dok	4 dok	57,206,620	56,132,620	98.12	
			Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan bulanan, triwulan dan tahunan pelaksanaan pembangunan daerah	12 dok, 4 dok dan 1 dok	12 dok, 4 dok dan 1 dok	265,067,250	241,900,110	91.26	

			Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	Jumlah rumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	2 dok	2 dok	105,217,000	102,877,000	97.78
--	--	--	--	--	-------	-------	-------------	-------------	-------

Berdasarkan tabel diatas ketercapaian masing-masing sub kegiatan dalam mencapai sasaran kinerja Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

#### I. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah berpedoman kepada Perjanjian Kinerja Kepala Bagian dengan Kepala Biro dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel. 3.3.1.5**

#### Perjanjian Kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan tepat waktu	92%
2.	Optimalnya tertib administrasi pembangunan	Tingkat kesesuaian administrasi pelaksanaan kegiatan dengan standar pada Perangkat Daerah	92%
3.	Optimalisasi pengendalian pembangunan	Persentase rekomendasi yang diberikan kepada Perangkat Daerah terhadap permasalahan administrasi pembangunan	92%
4.	Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi	Nilai ko,ponen pelaporan pada evaluasi SAKIP	18,79
5.	Meningkatnya kualitas pelaporan organisasi	Nilai komponen pelaporan pada evaluasi SAKIP	10,15

6.	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Nilai evaluasi internal pada evaluasi SAKIP	6,19
7.	Penempatan pegawai sesuai dengan peta jabatan	Persentase pegawai yang penempatannya sesuai dengan peta jabatan	100%
8.	Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian	1.Persentase layanan adm kepegawaian sesuai SOP 2.Persentase layanan surat menyurat sesuai SOP 3.Persentase Layanan Saprasi sesuai SOP	100% 100% 100%
9.	Meningkatnya pengelolaan BMD	1. Persentase BMD dalam kondisi baik 2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Saprasi pendukung kinerja	12,9% 100%
10.	Meningkatnya kapabilitas SDM organisasi	Jumlah SDM yang mengikuti pengembangan kompetensi	3

Berdasarkan Perjanjian kinerja pada tabel 3.2.1 tersebut untuk pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai Indikator Kinerja Program yaitu **“Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD dengan target 92%”**.

Selain melaksanakan sasaran pengendalian pembangunan Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah juga melaksanakan sasaran Ketatausahaan Biro yang terkait dengan perencanaan organisasi, pelaporan organisasi, pengawasan internal, pelayanan umum, pengelolaan Barang Milik Daerah dan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Biro.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2023 melaksanakan 2 Sub Kegiatan yaitu

**a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, yang melaksanakan kegiatan :**

- Pelaksanaan monev paket kegiatan di SKPD se-Sumatera Barat
- Pelaksanaan rapat-rapat penyelesaian masalah
- Pelaksanaan rakor dengan OPD
- Pembuatan laporan triwulan, dan laporan akhir kegiatan
- Kegiatan insidental seperti pendampingan tamu resmi dll

Untuk realisasi Fisik sampai tanggal 31 Desember 2023 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera sebesar :

$$\frac{99,07}{99,96} \times 100\% = 99,11\%$$

Dari hasil realisasi fisik 99,11% berarti melebihi dari target pada Indikator Kinerja Program Kegiatan *Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD sebesar 92%*

Untuk realisasi Keuangan sampai tanggal 31 Desember 2023 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera sebesar :

$$\frac{94,28}{99,44} \times 100\% = 94,81\%$$

Dari hasil realisasi fisik 94,81% berarti melebihi dari target pada Indikator Kinerja Program Kegiatan *Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD sebesar 92%*

Angka realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Hasil Rekapitulasi Aplikasi Simbangda) tabel 3.2.2 sebagai berikut :

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT APBD PERUBAHAN TAHUN 2023

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Per SKPD  
Kondisi realisasi sampai 31 Desember 2023

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEREA	Fisik				Keuangan				ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMERANGKUAN	Fisik				Keuangan				ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Fisik				Keuangan									
	T	R	D	D	T	R	D	D		T	R	D	D	T	R	D	D		T	R	D	D	T	R	D	D						
BAGAN KESEKUTUAN BANGSA DAN POLITIK	100,00	100,00	0,00	100,00	98,00	98,00	-1,99	-1,99	100,00	100,00	0,00	0,00	94,58	95,82	-0,76	-0,76	100,00	100,00	0,00	100,00	97,77	97,77	-2,23	-2,23	100,00	100,00	0,00	100,00	85,04	85,04	-14,96	-14,96
BAGAN PERENCANAAN BERKUALITAS DAN BERKEMAMAHAN	99,88	99,94	-0,54	94,25	96,78	-1,48			100,00	100,00	0,00	100,00	98,03	98,03	-1,95	-1,95	100,00	100,00	0,00	100,00	94,51	94,51	-5,49	-5,49	100,00	100,00	0,00	100,00	82,30	82,30	-17,70	-17,70
BIRU HUKUM	100,00	100,00	0,00	100,00	92,21	-7,79			100,00	99,38	-1,62	100,00	93,31	93,31	-6,69	-6,69	100,00	100,00	0,00	100,00	92,30	92,30	-7,70	-7,70	100,00	100,00	0,00	100,00	82,30	82,30	-17,70	-17,70
BIRU KECANTIKAN MASYARAT	100,00	99,80	-1,20	100,00	83,81	-14,19			100,00	99,70	-1,30	100,00	94,41	94,41	-5,59	-5,59	100,00	100,00	0,00	100,00	91,87	91,87	-8,13	-8,13	100,00	100,00	0,00	100,00	81,13	81,13	-18,87	-18,87
BIRU PERENCANAAN DAN OTONOMI DAERAH	100,00	99,59	-0,41	100,00	91,81	-8,19			100,00	97,46	-2,54	100,00	90,07	90,07	-3,93	-3,93	100,00	100,00	0,00	100,00	99,24	99,24	-0,76	-0,76	100,00	100,00	0,00	100,00	99,24	99,24	-0,76	-0,76
DIRAS KEBUDAYAAN	100,00	99,94	-0,06	100,00	92,09	-7,91			100,00	97,66	-2,34	100,00	90,07	90,07	-3,93	-3,93	100,00	100,00	0,00	100,00	99,24	99,24	-0,76	-0,76	100,00	100,00	0,00	100,00	99,24	99,24	-0,76	-0,76
DIRAS KEPENDUKIKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	100,00	99,08	-0,92	100,00	98,07	-1,93			100,00	100,00	0,00	100,00	95,17	95,17	-4,83	-4,83	100,00	100,00	0,00	100,00	98,71	98,71	-1,29	-1,29	100,00	100,00	0,00	100,00	98,71	98,71	-1,29	-1,29
DIRAS KESEHATAN	99,78	99,72	-0,03	100,00	92,95	-7,05			100,00	99,91	-0,09	100,00	93,17	93,17	-6,83	-6,83	100,00	100,00	0,00	100,00	94,51	94,51	-5,49	-5,49	100,00	100,00	0,00	100,00	94,51	94,51	-5,49	-5,49
DIRAS PERBERKAAHAN MASYARAKAT DAN DESA	98,15	97,07	-1,08	94,38	-3,77			100,00	93,57	-6,43	100,00	92,83	92,83	-7,17	-7,17	100,00	100,00	0,00	100,00	91,14	91,14	-8,86	-8,86	100,00	100,00	0,00	100,00	91,14	91,14	-8,86	-8,86	
DIRAS PERBERKAAHAN PERSEKUTUAN DAN PERKAWINAN	100,00	100,00	0,00	100,00	93,13	-6,87			100,00	97,60	-2,40	100,00	93,87	93,87	-6,13	-6,13	100,00	100,00	0,00	100,00	98,71	98,71	-1,29	-1,29	100,00	100,00	0,00	100,00	98,71	98,71	-1,29	-1,29
DIRAS PERKAWINAN	100,00	99,95	-0,05	100,00	94,13	-5,87			100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	94,51	94,51	-5,49	-5,49	100,00	100,00	0,00	100,00	94,51	94,51	-5,49	-5,49
DIRAS SOSIAL	100,00	100,00	0,00	100,00	98,99	-1,01			100,00	100,00	0,00	100,00	96,76	96,76	-3,24	-3,24	100,00	100,00	0,00	100,00	98,71	98,71	-1,29	-1,29	100,00	100,00	0,00	100,00	98,71	98,71	-1,29	-1,29
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	100,00	0,00	100,00	97,55	-2,45			100,00	99,82	-0,18	100,00	98,34	98,34	-1,66	-1,66	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14	100,00	100,00	0,00	100,00	96,86	96,86	-3,14	-3,14
DIRAS SATUAN POLISI PAMONG PRA																																

**b. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN, melaksanakan kegiatan sebagai berikut :**

- Pelaksanaan monev paket kegiatan di SKPD yang anggaran bersumber dari dana APBN ( DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ) dan koordinasi dengan satuan kerja Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan di Sumatera Barat.
- Pelaksanaan rapat-rapat penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dana bersumber dari APBN
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan OPD, Satker Kementerian, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- Pembuatan laporan triwulan, dan laporan akhir kegiatan
- Kegiatan insidental seperti pendampingan tamu resmi dll

Berdasarkan Perjanjian kinerja tersebut untuk pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai Indikator Kinerja Program “ ***Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBN dengan target 92%*** “.

Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan melalui APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.408.899.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.89.466.324.665,00 atau 86,52%.

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan melalui APBN ini diberikan oleh 4 (empat) Kementerian yaitu :

1. Kementerian Pertanian.
2. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penugasan Urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 terbagi pada program/kegiatan pada 6 (enam) perangkat daerah, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 3.3.1.6**

**Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan  
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

NO	SKPD PENERIMA	KEMENTERIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				Rp.	%
1.	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	Kementerian Pertanian	41.347.138.000	40.913.208.607	98,95
2.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kementerian Pertanian	29.336.464.000	17.179.725.020	58,56
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	743.530.000	733.651.451	98,67
4.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.342.204.000	10.207.312.163	98,70
5.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.727.549.000	20.040.759.888	96,69
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	912.014.000	391.667.536	42,95
<b>TOTAL</b>			<b>103.408.899.000</b>	<b>89.466.324.665</b>	<b>86,52</b>

Sumber :Data Kanwil DJPb Sumatera Barat tanggal 31 Desember 2023

**Tabel. 3.3.1.7**

**DATA REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK PER 31 DESEMBER 2023**

NO	OPD	JENIS DANA/KELOMPOK BIDANG	PAGU	PENERIMAAN	%	REALISASI 31 DESEMBER 2023			KETERANGAN
						KEUANGAN	% Keu	% Fisik	
		Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp. 907.141.000.170	Rp. 907.141.000.170	100,00	Rp. 579.932.966.643	63,92	78,30	
1	DINAS PENDIDIKAN	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Rp. 424.127.990.000	Rp. 424.127.990.000	100,00	Rp. 346.145.509.105	81,61	90,00	- Realisasi SD Nov Data masih dikumpulkan dan sekolah
		Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	Rp. 6.246.578.000	Rp. 5.246.578.000	100,00	Rp. 1.811.000.000	30,71	90,00	
		Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	Rp. 462.211.209.000	Rp. 462.211.209.000	100,00	Rp. 219.787.363.700	47,33	49,00	
		Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD	Rp. 2.551.000.000	Rp. 2.551.000.000	100,00	Rp. 1.246.564.400	52,79	54,00	
2	DINAS KESEHATAN	Dana BCK Provinsi	Rp. 4.627.815.000	Rp. 4.627.815.000	100,00	Rp. 3.189.788.357	68,93	78,40	belum menyampaikan laporan
3	DINAS KEBUDAYAAN	Dana Bantuan Operasional Museum Dan Taman Budaya	Rp. 4.000.000.000	Rp. 4.000.000.000	100,00	Rp. 3.592.148.015	89,80	90,00	
	UPTD MUSEUM	- Museum	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.000.000.000	100,00	Rp. 1.940.025.974	97,00	90,00	
	UPTD TAMAN BUDAYA	- Taman Budaya	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.000.000.000	100,00	Rp. 1.752.122.041	87,61	90,00	
4	DINAS KOPERASI DAN UKM	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Rp. 3.050.122.170	Rp. 3.050.122.170	100,00	Rp. 2.917.891.900	95,64	90,00	
5	DINAS PTSP	Dana Fasilitas Penanaman Modal	Rp. 951.000.000	Rp. 951.000.000	100,00	Rp. 929.464.936	97,73	100,00	
6	DINAS PMP2KB	Dana Pelayanan Perlindungan Persewaan Dan Anak	Rp. 375.000.000	Rp. 375.000.000	100,00	Rp. 312.733.201	83,40	93,29	

Pada Tahun Anggaran 2023 Biro Administrasi Pembangunan telah memfasilitasi beberapa kali rapat permasalahan dan percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga melalui Satuan Kerja yang berada di Sumatera Barat, baik pelaksanaan pekerjaan infrastruktur hingga kegiatan ketertiban masyarakat.

Sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembanguna APBN tersedia anggaran sebesar Rp. 149.086.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 136.419.375,- (91,50%). Dimana dalam pelaksanaan pekerjaan untuk masing-masing personil tersedia PC Komputer, Printer, Wifi, kertas dan alat tulis lainnya.

Dari ke 2 ( dua ) Sub Kegiatan tersebut di Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah lebih banyak melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah dan melakukan rapat-rapat sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat Persentase OPD dalam melaksanakan kegiatan serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja.

Adapun rincian realisasi Anggaran Kegiatan 2023 untuk Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

**Tabel. 3.3.1.8**

**Anggaran Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

II	KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp. 922.424.743,-	Rp. 876.465.968,-	95,02
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 494.933.873,-	Rp. 475.556.238,-	96,08
1.a	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp. 123.952.408,-	Rp. 118.127.248,-	95,30
2.b	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp. 149.086.250,-	Rp. 136.419.375,-	91,50

Berdasarkan tabel 3.3.1.8 bahwa realisasi keuangan pada sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD sebesar 95,30% dan sub kegiatan Pengendalian Administrasi

Pelaksanaan Pembangunan APBN sebesar 91,50%. Dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan melebihi target dari yang ditetapkan 92% pada indikator kinerja program.

Secara keseluruhan Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan tugas berjumlah 13 orang yang terdiri dari 1 orang Kabag, 1 KTU, 2 pejabat fungsional penyetaraan, 2 orang analis pembangunan, 1 orang bendahara, 1 orang penyusun laporan keuangan, 1 orang perencanaan, penganggaran dan pelaporan, 3 sopir, dan 1 orang tenaga pramusaji.

Pelaksanaan sasaran yang terkait dengan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi pada Perjanjian Kinerja pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dijadikan sasaran pada kepala biro sebagai hasil akhir kinerja Biro Administrasi Pembangunan.

## **II. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah**

Dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah berpedoman kepada Perjanjian Kinerja Kepala Bagian yang diberpedoman dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel. 3.3.1.9**

**Perjanjian Kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan  
Pembangunan Wilayah**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan	Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan tepat waktu	92%
2.	Optimalisasi pengendalian pembangunan	Persentase rekomendasi pelaksanaan administrasi pengendalian pembangunan pada kabupaten/kota	92%

Pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah juga memiliki Indikator Kinerja Program yang sama yaitu :

**“ Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dengan target 92% “**

Adapun realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 3.3.1.10 berikut :

**Tabel 3.3.1.10**  
**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**  
**(LAPORAN KABUPATEN/KOTA KONDISI 31 DESEMBER 2023)**

NO	KABUPATEN/KOTA	PAGU APBD AWAL	PAGU APBD PERUBAHAN	REALISASI		
				Total Realisasi	% Keu	% Fisik
1	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	1,043,258,026,807	1,058,006,803,243	934,318,299,946	88.31	92.23
2	KABUPATEN PESIRIR SELATAN	1,721,101,942,573	1,812,062,326,491	1,570,876,830,835	86.69	90.00
3	KABUPATEN SOLOK	1,279,381,562,337	1,337,775,104,063	1,153,429,694,723	86.22	98.29
4	KABUPATEN SUJUNJUNG	1,083,334,471,176	1,161,213,878,062	971,031,135,413	83.62	88.85
5	KABUPATEN TANAH DATAR	1,302,795,242,628	1,300,379,192,850	1,219,365,569,135	93.77	98.66
6	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	1,515,825,449,551	1,443,596,102,849	1,243,369,323,384	86.13	91.83
7	KABUPATEN AGAM	1,559,880,451,816	1,572,962,608,928	1,310,435,149,498	83.31	95.13
8	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	1,286,461,322,819	1,283,339,378,667	1,150,257,085,099	89.63	97.62
9	KABUPATEN PASAMAN	1,144,332,999,377	1,165,085,887,904	1,047,761,738,992	89.93	93.26
10	KABUPATEN SOLOK SELATAN	910,794,628,432	933,186,620,627	832,495,784,261	89.21	86.44

11	KABUPATEN DHARMASTRAYA	1,029,378,138,553	982,267,918,085	857,421,665,696	87.29	95.93
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	1,176,371,230,327	1,303,798,471,586	1,146,572,793,210	88.04	92.00
13	KOTA PADANG	2,582,776,823,796	2,499,783,575,679	2,324,548,747,024	92.99	99.16
14	KOTA SOLOK	694,854,784,916	677,159,446,427	659,485,584,875	97.39	97.91
15	KOTA SAWAH LUNTO	597,376,662,648	669,237,924,585	593,814,810,484	88.73	90.45
16	KOTA PADANG PANJANG	613,163,025,681	627,319,623,960	560,698,279,895	89.38	99.20
17	KOTA BUKITTINGGI	833,948,428,755	811,015,183,922	739,808,050,774	91.22	98.40
18	KOTA PAYAKUMBUH	771,277,278,140	810,699,749,841	726,062,695,958	89.56	96.72
19	KOTA PARIAMAN	675,911,417,397	680,904,853,354	619,164,014,291	90.93	94.54
	<b>TOTAL</b>	<b>21,822,223,887,729</b>	<b>22,129,794,651,123</b>	<b>19,660,917,253,495</b>	<b>89.07</b>	<b>94.56</b>

Tabel 3.3.1.10 menampilkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten/Kota kondisi sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi fisik 94,56% berarti melebihi dari target Indikator Kinerja Program yaitu 92%. Realisasi keuangan sebesar 89,07% berarti berada dibawah target sebesar 92%. Hal ini disebabkan dalam melakukan penginputan realisasi keuangan rata-rata di Kabupaten/Kota yang belum menggunakan aplikasi sehingga mengakibatkan data yang disajikan belum maksimal.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah untuk tahun 2023 melaksanakan 1 (satu) buah Sub Kegiatan yaitu :

1. Pengendalian Adminitrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dengan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan :
  - Pelaksanaan Koordinasi;
  - Pelaksanaan Koordinasi Realisasi APBD dan APBN Kab/Kota ;
  - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
  - Rapat Evaluasi.
  - Rapat Pengendalian dan Monev BKK.
2. Menyikapi pentingnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan ( LRFK ) kabupaten/kota, maka melalui Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, dipersiapkanlah beberapa langkah kerja dan target kinerja yang terukur, yakni :
  - a. Mengadakan pertemuan awal dengan Kabupaten Kota
  - b. Meminta dan merekap LRFK pada 19 (Sembilan Belas) Kabupaten Kota
  - c. Menyampaikan data LRFK tiap bulan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota
  - d. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Bappeda, BPKAD dan Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Kota secara rutin.
  - e. Mengadakan Rapat Evaluasi Kabupaten Kota.

Berdasarkan uraian diatas tahun 2023 anggaran APBD yang pada kegiatan Pengendalian Administarsi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah sebesar **Rp. 221.895.215,-** dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 **Rp. 221.009.615,-** dan sisa **Rp. 885.600,-** oleh sebab itu capaian kinerja dari target 92% sudah bisa dikatakan tercapai dengan hasil realisasi persentase sebesar **99,60 %**.

Dari Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah lebih banyak melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota dan melakukan rapat-rapat sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dengan tujuan dapat mengetahui tingkat Persentase dalam melaksanakan kegiatan serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan seusai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja.

Adapun realisasi anggaran Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah sebagai berikut :

**Tabel. 3.3.1.11**

**Anggaran Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	<b>KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	922.424.743	876.465.968	95,02
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp. 221.895.215,-	Rp. 221.009.615,-	99,60

Dari tabel 3.3.1.11 dapat disimpulkan realisasi keuangan sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mencapai 99,60% dengan artinya melebihi target 92% berdasarkan indikator kinerja program.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah sub kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, sehingga sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah sebagian kecil dari

Pengendalian Administarsi Pembangunan Daerah. Pada Bagian Pengendalian Administasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah terdapat 5 orang Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 1 orang Kabag, 2 orang pejabat fungsional penyetaraan, 1 orang pelaksana Analisis Pembangunan dan 1 orang pengadministrasi umum. Alat pendukung pekerjaan untuk masing-masing personil tersedia PC komputer, Printer, Wifi, kertas dan alat tulis lainnya

### III. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai Perjanjian Kinerja dengan Kepala Biro sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1.12

#### Perjanjian Kinerja Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembangunan	1. Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan tepat waktu	92%
		2. Persentase kabupaen/kota melaksanakan kegiatan tepat waktu	92%
2.	Optimalisasi pengendalian pembangunan	Persentase rekomendasi yang diberikan terhadap permasalahan administrasi pembangunan	92%

Dari Perjanjian Kinerja untuk Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai Indikator Kinerja Program “ **Kebijakan Administrasi Pembangunan Yang Dihasilkan dengan target 2 sasaran** “

Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Analis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
  - a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan analisis capaian kinerja pembangunan daerah. Pelaksanaan koordinasi kegiatan semula direncanakan melalui pertemuan atau kunjungan ke UPTB yang ada di Kab/Kota dan ke Pemerintah Pusat untuk koordinasi dan konsultasi Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri.
  - b. Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah di Bidang Analisis Capaian Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dilakukan melalui aplikasi Simbangda based evidence yang dilakukan secara rutin oleh helpdesk dan admin Simbangda dan hasilnya berupa rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan SKPD setiap akhir bulan.
  - c. Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah. Pada tahun 2023 dilakukan rapat koordinasi bersama SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan sistim rapat sesuai lingkup per asisten.
2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  - a. Melaksanakan rapat persiapan dengan materi pengarahan, penyamaan persepsi dan pembagian tugas terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
  - b. Menyusun dan menerbitkan SK Tim Pelaksana Pelaporan Pembangunan tahun 2023;
  - c. Melakukan inventarisasi terhadap kegiatan / pekerjaan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD lingkup Provinsi Sumatera Barat dan mengelompokkannya atas beberapa kriteria.

- d. Menyampaikan tatanan pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan instrumen money, peraturan gubernur, serta surat edaran gubernur.
  - e. Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis serta rapat tindak lanjut permasalahan bersama SKPD terkait serta unsur terkait lainnya.
  - f. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan / kemajuan pekerjaan SKPD setiap bulannya dan atau triwulan.
  - g. Melaksanakan rapat evaluasi secara berkala (triwulan) bersama SKPD, Asisten, Sekda dan Gubernur/Wakil Gubernur
  - h. Melaksanakan rapat dalam rangka penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan SKPD bersama Tim yang telah ditetapkan.
  - i. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala.
3. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
- a. Menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Provinsi Sumatera Barat;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang HSPK dan ASB
  - c. Memfasilitasi pemanfaatan HSPK dan ASB oleh Perangkat Daerah
  - d. Menyiapkan rencana pengembangan SDM
  - e. Menyiapkan rencana monitoring dan evaluasi
  - f. Menyusun Laporan

Pelaksanaan pekerjaan HSPK dan ASB tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro, akan tetapi pekerjaan tersebut merupakan tugas tambahan diberikan oleh pimpinan kepada Biro Administrasi Pembangunan.

Dari ke 3 (tiga) Sub Kegiatan pada Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan melaksanakan Perjanjian Kinerja yang bertujuan terlaksananya ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen

yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam menggunakan anggaran baik yang bersumber dari APBD dan APBN.

Realisasi anggaran kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel. 3.3.1.13**

**Anggaran Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**

2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 427.490.870,-	Rp. 400.909.730,-	93,78
2.a	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp. 57.206.620,-	Rp. 56.132.620,-	98,12
2.b	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 265.067.250,-	Rp. 241.900.110,-	91,26
2.c	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp. 105.217.000,-	Rp. 102.877.000,-	97,78

Dari tabel 3.2.15 merupakan capaian realisasi keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yaitu **93,78%** yang mana target realisasi keuangan sebesar 92%. Sedangkan untuk perumusan kebijakan yang dihasilkan hanya 1 buah kebijakan yang terealisasi sehingga terpenuhinya target kebijakan

Pada kegiatan Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan terdapat 8 orang Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 1 orang Kabag, 1 orang pejabat fungsional penyetaraan, 4 orang pelaksana Analisis Pembangunan, 1 orang Pengadministrasi Umum dan 1 orang tenaga IT. Kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 427.490.870,- dan terealisasi sebesar Rp. 400.909.730,- (93,78%). Alat pendukung pekerjaan untuk masing-masing personil tersedia PC Komputer, Printer, Wifi, kertas dan alat tulis lainnya

Terhadap pelaksanaan 2 (dua) kegiatan 6 (enam) sub kegiatan oleh 3 (tiga) Bagian pada Biro Administrasi Pembangunan dapat dilakukan pengukuran sebagai hasil kinerja sebagai berikut ini pada tabel 3.2.16:

108,94%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 terjadi refocusing terhadap beberapa anggaran kegiatan sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan akan mempengaruhi juga terhadap pembuaan eviden pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi juga terhadap pelaksanaan tertib administrasi pembangunan yang harus disampaikan ke Biro Administrasi Pembangunan.

#### Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Dokumen Renstra.

Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan "***Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal***" adalah mendukung tercapainya sasaran kepala daerah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP sesuai yang dimuat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 3.3.1.15**  
Perbandingan Capaian Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Tahun 2023 dengan Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023 (%)			Target Akhir	Capaian s.d Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD/Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	92	PD : 97,23	105,68	95	102,35
				Kab/Kota :100	108,69		105,26
Rata-rata capaian kinerja					107,18		103,80

Capaian Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Tahun 2023 telah mendukung capaian target pada Renstra/RPJMD sebesar 107,18%. Sedangkan sampai akhir capaian RPJMD dan Renstra, Capaian Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal sebesar 103,80 yang berarti melebihi target akhir RPJMD dan Renstra.

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.** Biro Administrasi Pembangunan Sekretariata Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki pembanding pada tingkat nasional sehingga tidak dapat dibuatkan Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Aternative Solusi yang Telah dilakukan.** Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dalam melakukan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan tercapaiannya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya sebagai berikut :

- 1) Memastikan setiap saat Perangkat Daerah melakukan tahapan upload dokumen sebagai data dukung dan ketepatan waktu melaksanakan tertib pelaksanaan administrasi pembangunan aplikasi Simbangda.
- 2) Melaksanakan rapat evaluasi terhadap capaian realisasi fisik dan keuangan setiap bulannya yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat.
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap paket-paket pekerjaan untuk memperkecil/mengurangi terjadinya pelaksanaan pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, pekerjaan yang tidak selesai tahun sebelumnya sehingga tahun berlangsung dapat melaksanakan pekerjaan tepat waktu.
- 4) Melaksanakan koordinasi, montoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK, Dekon dan TP secara berkala.

**Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2024**, maka Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan alternative tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi melalui desk pengendalian untuk masing-masing OPD secara berkala dengan melibatkan Tim Terpadu
- 2) Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan secara berkala dan secara bertingkat (Rapat Teknis, Rapat per Asisten dan Rapat Pimpinan)
- 3) Monitoring dan Evaluasi secara terpadu dengan OPD lainnya terhadap kegiatan sepanjang dibutuhkan
- 4) Fasilitasi melalui desk pengendalian untuk masing-masing OPD penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara berkala
- 5) Koordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan Kanwil Keuangan untuk harmonisasi data realisasi DAK, Dekon dan TP secara berkala

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal, diperlukan sumber daya yang memadai mencakup :

#### 1. Sumber Daya Manusia Yang Kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Biro Administrasi Pembangunan Sekeretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di dukung oleh ketersediaan 3 orang pejabat struktural selaku pelaksanaan kegiatan dan dibantu oleh pejabat fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda 3 orang dan Perencana Ahli Muda 3 orang dalam melakukan analisis dan

melaksanakan kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

## 2. Sarana Dan Prasarana Yang Memadai

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Biro Administrasi Pembangunan Sekeretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung dengan sarana kompoter dengan menggunakan Aplikasi Simbangda berbasis evidence.

## 3. Ketersediaan Anggaran Yang Efektif

Dalam rangka mencapai keberhasilan sasaran strategis Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Biro Administrasi Pembangunan Sekeretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dengan target 92% pada tahun 2023 yang telah tercapai sebesar 97,23 % untuk Perangkat Daerah dan 100% untuk Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian sebesar 105,68% untuk Perangkat Daerah dan 108,69 untuk Kabupaten/Kota, sehinggatotal capaian kinerja dari kedua capaian kinerja indikator sebesar **107,18%**. Untuk mewujudkan sasaran tersebut disediakan anggaran sebesar Rp. 922.424.743,- dengan realisasi sebesar 876.465.968,- atau sebesar 95,02%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk 1 (satu) program 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 922.424.743

CK = Capaian Kinerja (%) = 107,18%

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 876.465.968

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.}922.424.743 \times 107,18\%) - \text{Rp.}876.465.968}{(\text{Rp.}922.424.743 \times 107,18\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{988.654.839,55 - 876.465.968}{988.654.839,55} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi = 11,34%

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 11,34% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 922.424.743,- yang terealisasi sebesar Rp 876.465.968,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dengan capaian indikator kinerja sebesar 107,18%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan :



Tabel 3.3.1.16

TABEL 3.8

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2003  
 PADA SASARAN MEWUJUDKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN YANG OPTIMAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN Rp.	REALISASI ANGGARAN Rp.	CAPAIAN (%)		
Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal	Perencanaan perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan	Kebijakan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Kegiatan administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Kelembagaan administrasi pembangunan yang dihentikan			922.424,743	876.465,968	95,02		
				Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD							
				Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN							
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat	92%	Fisik : 99,07 Keu : 94,28	494.933,873	475.556,238	96,08		
			Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Prov. Sumbar	92%	Fisik : 99,07 Keu : 94,28	123.952,408	118.127,248	95,3		
			Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN	92%	Fisik : 93,81 Keu : 93,01	149.086,250	136.419,375	91,5		
			Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	Persentase realisasi fisik dan keuangan yang bersumber dari APBD Kab/Kota, dana APBN yang diterima Kab/Kota	92%	Fisik : 94,56 Keu : 89,07	221.895,215	221.009,615	99,6		

				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi fisik dan keuangan SKPD Prov. Dan Persentase Kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan target	92%	Fisik :99,07 Keu : 94,28	427.490,570	400.909,730	93,78
				Analisis capaian kinerja pembangunan daerah	Jumlah hasil analisis triwulan terhadap capaian kinerja pembangunan daerah	4 dok	4 dok	57.205,620	56.132,620	98,12
				Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan bulanan, triwulan dan tahunan pelaksanaan pembangunan daerah	12 dok, 4 dok dan 1 dok	12 dok, 4 dok dan 1 dok	255.067,250	241.900,110	91,26
				Facilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	Jumlah rumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	2 dok	2 dok	105.217,000	102.877,000	97,78

Sumber data : Realisasi rencana aksi kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumbar

### 3.3.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menjadi pondasi penting di dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional, dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan utuh.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuan melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara professional dan handal serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan manajemen pemerintahan.

Sehubungan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya telah melakukan suatu perencanaan yang terangkum dalam suatu perencanaan strategis yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat suatu sasaran strategis yang berkaitan kepada Tata Kelola Organisasi.

Tujuan ke-2 Renstra Biro ADministrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani diukur melalui 2 indikator kinerja tujuan yaitu 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan 2)Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.3.2.1

Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2 Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	B (65 )	BB (70,16)	107,94	BB ( 75)	93.54
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (83)	B (85,93)	103,53	B (75)	114.57
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 2					105.74		

Dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan kedua telah dicapai dengan baik, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 105.74% Jika dilihat pada target akhir Renstra, diprediksi target tujuan ini akan dapat tercapai. Ketercapaian target kinerja tujuan kedua ini direalisasikan dengan 2 sasaran strategis yaitu 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan; 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi. Berikut analisis capaian sasaran kinerja pada Tahun 2023.

2.1 Sasaran Strategis “ **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi** ”

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023. Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/38/INSP-LHE-SAKIP/VIII-2023 tanggal 02 Agustus 2023, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai akuntabilitas kinerja 70,16 dengan kategori BB dari target sebesar 65 (B) atau dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 107,94%. Nilai ini menunjukkan bahwa

AKIP Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat baik, dengan menunjukkan akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang baik.

**Tabel. 3.3.2.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kode
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (65)	BB (70,16)	107,94	Sangat Tinggi	
Rta-rata capaian kinerja					107,94		

Sumber data : Hasil analisis capaian kinerja Biro Administarsi Pembangunan Tahun 2023

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.**  
 Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini meningkat dari nilai 60,08 menjadi 70,16 atau meningkat 10.08 point. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada Biro Adminisytasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.3.2.3**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 2 Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2021, 2022 dan 2023**

No	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN (%)			KET
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	NA	60	60.08	66	59.81	60.08	70.16	99.68	100	107.94	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2021,2022 DAN 2023									99.68	100	107.94	

Dari tabel diatas dapat diartikan bahwa Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan mengalami peningkatan hal ini disebabkan tahun 2021 merupakan awal Biro Administrasi Pembangunan baru

dibentuk karena terjadinya pemutahiran terhadap nomenklatur seluruh Perangkat Daerah pada Provinsi Sumatera Barat.

## 2.2 Sasaran Strategis “ **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi** ”

Pengukuran kualitas pelayanan organisasi pada Biro Administrasi Pembangunan dilakukan dengan menyerahkan kuisisioner kepada Perangkat Daerah ( OPD Provinsi ) dan Kabupaten/Kota sebagai OPD yang dilayani oleh Biro Administrasi Pembangunan. Adapun jumlah Kuisisioner yang disampaikan berjumlah 11 pertanyaan.

Responden yang diberikan kuisisioner dibagikan kepada 50 OPD Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota. Dari kuisisioner yang diberikan dapat dilakukan rekapitulasi sebagai bahan untuk memperoleh nilai tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan Biro. Adapun beberapa unsur yang dipertanyakan pada kuisisioner sebagai berikut :

- a. Prosedur pelayanan
- b. Persyaratan dan jenis pelayanan
- c. Kesesuaian persyaratan
- d. Kejelasan informasi
- e. Jumlah personil yang melayani
- f. Sarana pendukung dstnya

Dari unsur pertanyaan yang dijawab pada kuisisioner tersebut akan memperoleh hasil responden kuisisioner yang akan dipergunakan sebagai indikator kinerja biro. Responden yang menyerahkan kembali lembaran kuisisioner berjumlah 78 lembar, sehingga diperoleh rekapitulasi kuisisioner yang disebarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.3.2.4**  
**Tabel Rekapitulasi Kuisisioner**

No Respon den	Pertanyaan											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43
2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	40
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
9	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	35
10	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	38
11	4	3	4	3	4	3	3	4	3	2	3	36
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
14	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	40
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
16	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	37
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
20	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	36
21	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	37
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
23	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	38
24	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	34
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
28	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	38
29	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
31	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	34
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
36	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
39	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	33
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44

44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	32
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	32
46	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	37
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
48	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	36
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	31
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
52	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
56	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34
57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
58	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	40
59	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	40
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
61	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
63	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	42
64	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	33
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
66	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
67	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	36
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
72	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	37
73	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	38
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
77	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	43
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
Jumlah	269	267	267	269	267	267	274	272	268	256	273	2949
	3.45	3.42	3.42	3.45	3.42	3.42	3.51	3.49	3.44	3.28	3.50	

No Responden	Pertanyaan	Jumlah	Nilai Konversi
1	kemudahan prosedur pelayanan	269	0.38
2	kesesuaian persyaratan pelayanan	267	0.38
3	Kejelasan informasi layanan	267	0.38
4	kompetensi/kemampuan personil	269	0.38
5	kedisiplinan personil	267	0.38
6	ketepatan waktu pelayanan	267	0.38
7	kesopanan dan keramahan personil	274	0.39
8	tanggung jawab personil	272	0.38
9	keadilan personil dalam	268	0.38
10	dukungan infrastruktur	256	0.36
11	keamanan dan kenyamanan	273	0.36
Total		2949	4.13
			<b>103.37</b>

Total Nilai Pertanyaan 44 (nilai maksimal) X responden = 3432

$$\text{NILAI IKM} = \frac{2949}{3432} \times 100\% = 85,93$$

Dari perhitungan nilai IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) tersebut dapat di buat tabel Tingkat kepuasan Pelayanan Organisasi sebagai berikut :

**Tabel 3.3.2.5**

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabilitas Kinerja dan Melayani Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kode
	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (83)	BB (85.93)	103.53	Sangat Tinggi	
Rata-rata capaian kinerja					103.53		

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil capaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat bernilai **103,53% dengan artian Sangat Baik**.

Sedangkan **perbandingan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi antara tahun 2021, 2022 dan 2023** sebagai berikut :

**Tabel 3.3.2.6**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 2**  
**Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi**  
**Tahun 2021, 2022 dan 2023**

No.	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			KET
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN ORGANISASI	NA	NA	80	83	NA	88,33	85,93	NA	110,28	103,53	
RATA-RATA									NA	110,28	103,53	
KRITERIA PENILAIAN									SANGAT BAIK			

Terjadinya penurunan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi 2023 oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebabkan karena menurunnya pelayanan Biro Administrasi Pembangunan kepada Perangkat Daerah dalam melakukan penilaian realisasi fisik dan keuangan Perangkat Daerah yang mana akibat dari pengaruh terjadinya refocusing anggaran pada tahun 2023.

### 3.4 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan anggaran murni sebesar Rp. 2.487.197.651,- sedangkan pada perubahan anggaran menjadi Rp. 2.036.614.339,-. Anggaran tersebut diperuntukan untuk 2 (dua) program,

9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Sampai konsidi akhir tahun 31 Desember 2023 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah merealisasi anggaran sebesar Rp. 1.951.418.693,- atau sebesar 95,82%. Adapun realisasi anggaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

**Tabel 3.4.1**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	<b>BELANJA DAERAH</b>	Rp. 2.036.614.339	Rp. 1.951.418.693,-	95,82
<b>I</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	Rp. 1.114.189.596,-	Rp. 1.074.952.725,-	96,48
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp. 39.484.500,-	Rp. 37.448.500,-	99,84
1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 19.437.500,-	Rp. 19.437.500,-	100
1.b	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 9.647.000,-	Rp. 9.647.000	100
1.c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.700.000,-	Rp. 2.700.000,-	100
1.d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.700.000,-	Rp. 5.664.000,-	73,56
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp. 66.236.000,-	Rp. 64.892.000,-	97,97
2.a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 63.350.000,-	Rp. 63.350.000,-	100
2.b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 2.886.000,-	Rp. 1.542.000,-	53,43
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Rp. 19.410.000,-	Rp. 19.304.405,-	99,46
3.a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 17.760.000,-	Rp. 17.654.405,-	99,41
3.b	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 1.650.000,-	Rp. 1.650.000,-	100
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Rp. 80.712.000,-	Rp. 79.500.000,-	98,50
4.a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 77.052.000,-	Rp. 75.840.000,-	98,43
4.b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 3.660.000,-	Rp. 3.660.000,-	100
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp. 716.544.200,-	Rp. 686.178.174,-	95,76
5.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 63.355.450,-	Rp. 62.210.000,-	98,19
5.b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 70.205.000,-	Rp. 58.356.000,-	83,12
5.c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 50.132.500,-	Rp. 50.132.500,-	100
5.d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 21.432.000,-	Rp. 21.432.000,-	100
5.e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 511.419.250,-	Rp. 494.047.674,-	96,60
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp. 80.727.896,-	Rp. 80.727.896,-	100

6.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	100
6.b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 76.727.896,-	Rp. 76.727.896,-	100
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 111.075.000,-</b>	<b>Rp. 106.901.750,-</b>	<b>96,24</b>
8.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenadaraan Dinas Jabatan	Rp. 44.990.000,-	Rp. 41.190.554,-	91,55
8.b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 44.505.000,-	Rp. 44.131.196,-	99,16
8.c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 21.580.000,-	Rp. 21.580.000,-	100
II	<b>KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Rp. 922.424.743,-</b>	<b>Rp. 876.465.968,-</b>	<b>95,02</b>
1	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp. 494.933.873,-</b>	<b>Rp. 475.556.238,-</b>	<b>96,08</b>
1.a	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp. 123.952.408,-	Rp. 118.127.248,-	95,30
2.b	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp. 149.086.250,-	Rp. 136.419.375,-	91,50
3.c	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp. 221.895.215,-	Rp. 221.009.615,-	99,60
2	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp. 427.490.870,-</b>	<b>Rp. 400.909.730,-</b>	<b>93,78</b>
2.a	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp. 57.206.620,-	Rp. 56.132.620,-	98,12
2.b	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 265.067.250,-	Rp. 241.900.110,-	91,26
2.c	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp. 105.217.000,-	Rp. 102.877.000,-	97,78

**Tabel 3.4.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 2**  
**Tahun 2021, 2022 dan 2023**

No	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN (%)			KET
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	NILAI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	NA	95	95	95	98,01	98,98	95,82	103,16	104,19	100,86	
RATA-RATA 2021,2022 DAN 2023									103,16	104,19	100,86	
KRITERIA PENILAIAN									SANGAT BERHASIL			

Dari tabel 3.4.2 dapat dilihat hasil capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 terhadap realisasi tahun 2023, serta dibandingkan antara realisasi dengan target untuk Tahun 2021 dan tahun 2022. Dari tabel di atas diperoleh capaian rata-rata realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi sebesar 100,86 % turun dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 hal ini disebabkan karena terjadinya refocusing anggaran

sehingga mempengaruhi kinerja biro. Sedangkan hasil capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi lebih dari capaian rata-rata yang 100% dengan kriteria penilaian **Sangat Berhasil**

**Realisasi anggaran Per Program yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja.** Sebagai salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja dengan dukungan anggaran pada masing-masing program. Secara terperinci pagu alokasi anggaran setiap program dan ketercapaian penyerapan pada masing-masing program dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 3.4.3**  
**Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

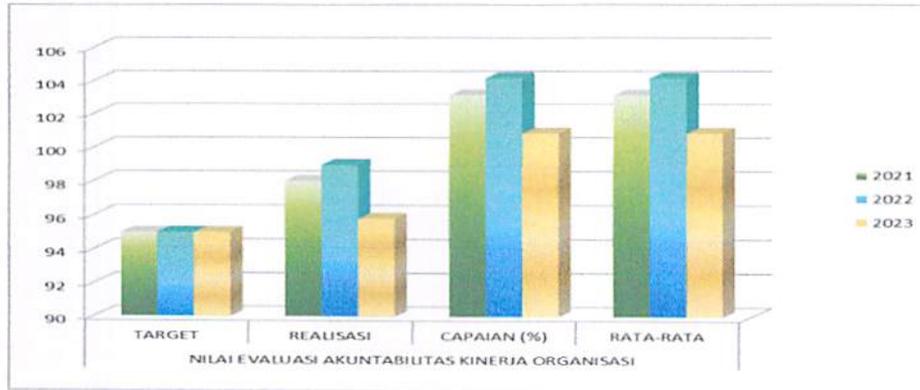
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja tahun 2023			Program	Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal	Persentase perangkat daerah dan pemerintah kabupaten / kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan	92%	PD : 97,23% Kab/Kota : 100%	105,68	Kebijakan Administrasi Pembangunan	922,424,743	876,465,968	95,02
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (65)	BB (70,16)	107,94	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,114,189,596	1,074,952,725	96,48
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (83)	B (85,93)	103,53				
<b>Capaian Kinerja</b>					<b>106,46</b>	<b>Capaian Anggaran</b>	<b>2,036,614,339</b>	<b>1,951,418,693</b>	<b>95,82</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa :

1. Penggunaan anggaran sebesar 95,82% tersebar pada 2 (dua) program dapat tercapai kinerja oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar 106,46 %. Hak tersebut diartikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran pendukungnya telah berhasil maksimal dalam mencapai 3 (tiga) sasaran kinerja Biro Administrasi Pembangunan yaitu Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal dengan indikator Persentase perangkat daerah dan pemerintah kabupaten / kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan, Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi
2. Serapan anggaran tahun 2023 pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan serapan sebesar 95,02% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi serapan sebesar 96,46%.

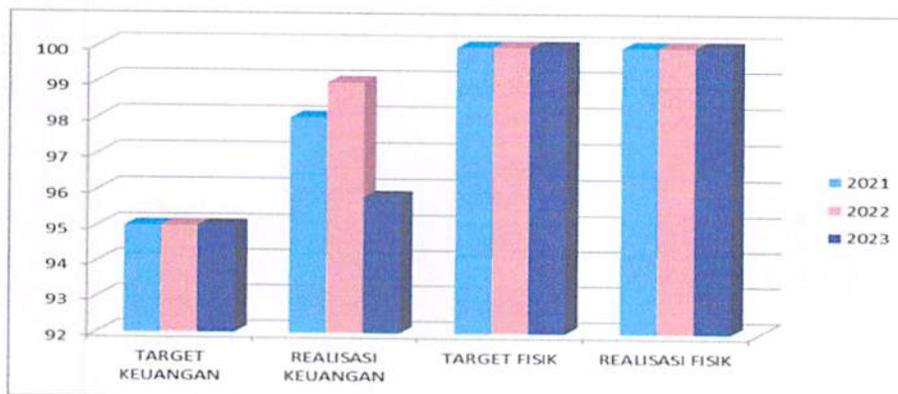
Perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya. Adapun realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik 3.4.1**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan**  
**Tahun 2021, 2022 dan 2023**



Berdasarkan kepada tingkat realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat perbandingan realisasi anggaran dan fisik 2021,2022 dan 2023 pada grafik 3 dibawah ini :

**Grafik 3.4.2**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik**  
**Tahun 2021, 2022 dan 2023**



## BAB IV PENUTUP

### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas untuk tahun 2023 Biro Administrasi Pembangunan secara keseluruhan pencapaian kinerja Tahun 2023 dapat disimpulkan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja yang pelaksanaannya Bulan Januari s.d Desember 2023 dengan hasil capaian kinerja sebesar **106,46%**
2. Usaha yang dilakukan dalam rangka dalam rangka mewujudkan indikator kinerja terhadap ***Persentase Perangkat Daerah Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan*** adalah dengan menerapkan penggunaan aplikasi Simbangda bagi seluruh OPD Provinsi agar dapat terlaksananya tertib administrasi pembangunan yang mana seluruh OPD malakukan tahapan upload dokumen sebagai data dukung dan ketepatan waktu melaksanakan tertib pelaksanaan administrasi pembangunan.
3. Usaha yang dilakukan dalam rangka dalam rangka mewujudkan indikator kinerja terhadap ***Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan*** melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota untuk dapat menyerahkan laporan pelaksanaan pembangunannya dengan tepat waktu.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu

informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran startegis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

## 1.2 Permasalahan dan Kendala

Pencapaian kinerja untuk tahun 2023 terhadap pelaksanaan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan terhadap anggaran yang disesuaikan dengan Perjajian Kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang dialami selama tahun 2023 antara lain :

- e. Perlunya memperbarui beberapa peraturan terkait pembangunan di Sumatera Barat seperti peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, peraturan tentang pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan lewat tahun anggaran, peraturan tentang proyek strategis/tahun jamak. Sehingga ada kepastian hukum dan pegangan bagi pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- f. Monev yang dilaksanakan hanya menyentuh sebagian kecil dari paket pekerjaan yang ada. Sehingga untuk mengambil kesimpulan dengan sampel yang sedikit itu tentunya kurang valid. Sehingga kedepannya perlu peningkatan jumlah sampel monev yang dilaksanakan dengan tujuan mengurangi faktor kesalahan dalam mengambil kesimpulan masalah-masalah pembangunan.
- g. Kurangnya sarana mobilitas sangat berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan. Idealnya monev yang dilaksanakan selain yang terencana dengan melibatkan SKPD terkait sewaktu-waktu juga perlu dilaksanakan Sidak. Sehingga dapat dilihat kondisi asli dilapangan seperti apa. Hal ini

tentunya harus didukung oleh sarana mobilitas yang ideal dalam pelaksanaannya.

- h. Perlu adanya sinkronisasi dari beberapa OPD dalam pengendalian pelaksanaan sebuah kegiatan baik dalam sisi pelapooan pelaksanaan kegiatan, terutama sinkronisasi data realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana perimbangan.
- q. Perlu adanya perencanaan yang matang dari OPD dalam melaksanakan kegiatan, terutama OPD yang memiliki sumber dana dari APBD dan APBN agar ada time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi padatnya pelaksanaan kegiatan diakhir tahun anggaran.
- r. Terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output.
- s. Pada umumnya SKPD belum mengentrykan permasalahan dan rencana tindak lanjut di dalam sistem
- t. Data yang dilaporkan pada Aplikasi Simbangda agar update dan valid
- u. Belum optimalnya penyelesaian proses lelang karena adanya review HPS untuk pekerjaan Kontruksi.
- v. Masih adanya keterlambatan DAK yang belum selesai akibat kelalaian dari SKPD sehingga mengakibatkan kerugian pada daerah
- w. Belum lengkapnya dokumen/bukti yang harus diupload kedalam system
- x. Masih adanya kegiatan yang belum terlaksana dan proses tender yang belum keluar izinnya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.
- y. Terkait Adanya Sub Kegiatan baru yang tidak dapat diinput karena OPD belum mengetahui tata cara entry kegiatan tambahan.
- z. Sehubungan adanya perbedaan realisasi fisik dan realisasi keuangan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan perhitungan total realisasi antar fisik dan keuangan, dan sudah dilakukan rumusan dengan pemberian bobot terhadap realisasi fisik maupun realisais keuangan, sehingga terdapat keseimbangan terhadap realisasi fisik maupun keuangan.

- aa. Terkait adanya OPD yang merubah paket kegiatan menjadi rutin, sehingga perlu dilakukan penguncian terhadap kegiatan tertentu termasuk kegiatan pada program penunjang pemerintah pada anggaran rutin.
- bb. Terkait adanya penyatuan paket kegiatan yang seharusnya tidak disatukan.

Dari masalah yang disampaikan diatas dapat juga memperlambat proses pelaksanaan aplikasi Simbangda pada masing-masing OPD sehingga dapat memperlambat pelaksanaan proses tertib administrasi pembangunan. Karena keterlambatan dalam proses upload data ke aplikasi Simbangda menyebabkan lambatnya semua proses administrasi.